

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya persaingan bisnis yang semakin keras di era globalisasi seperti saat ini mengharuskan perusahaan untuk dapat tetap eksis di pasar global, apalagi sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016 yang meningkatkan tuntutan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk maupun yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, dimana kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dengan melakukan manajemen laba (Nurdian Akhmad, 2018).

Manajemen laba dalam perusahaan transportasi merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan, sementara sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan intervensi yang dilakukan manajer sesuai dengan kerangka standar akuntansi. (Hery, 2015:50). Dengan adanya aturan standar akuntansi keuangan tanpa menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan seluruhnya akan berdampak positif kepada laporan keuangan yang sehat dalam perpajakannya maupun laba yang diperoleh sehingga para investor percaya untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Suranti dan Rika, 2019).

Di dalam perusahaan manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Kualitas laba perlu diperhatikan karena laba merupakan parameter penting yang

digunakan untuk mengukur kinerja manajemen (Santi, D. K., & Wardani, D. K. 2018).

Adapun fenomena terkait tentang manajemen laba di Indonesia sangatlah rumit seperti yang dinyatakan bahwa pada kasus perusahaan berplat merah yaitu dengan kode emiten GIAA atau PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang pada tahun 2018 telah memanipulasi laporan keuangannya dengan memperoleh laba bersih pada tahun tersebut sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000) dari perjanjian pemasangan layanan konektivitas dengan nilai transaksi sebesar USD 239,94 juta antara Manajemen Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata), namun pendapatan tersebut masih fiktif atau belum dapat diakui karena melanggar PSAK 23 paragraf 20, 28 dan 29, menyebabkan penurunan angka manajemen laba kurang lebih sebesar Rp 1 Triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 700 M yang menyebabkan pembengkakan aktivitas perpajakan akibat perolehan laba yang terlalu tinggi (Erlangga Djumena, 2019).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk melakukan perencanaan pajak (Suandy 2014). Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*) (Mulatsih, Dharmayanti dan Ratnasari, 2019). Sebenarnya perencanaan pajak tersebut merupakan kegiatan yang legal karena di bolehkan pemerintah selagi ada di Indonesia dan dalam cakupan peraturan dalam perpajakan. Jadi melaksanakan perencanaan pajak disebuah perusahaan mendapatkan laba

bersih yang besar bila dilakukan secara baik dan diperbolehkan, jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan perencanaan pajak (Aprillia, I. Y., Mahsuni, A. W., & Mawardi, M. C. 2020). Tujuan dari perencanaan pajak untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan (Sugeng, B. 2015). Perencanaan pajak memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan keamanan uang tunai yang digunakan untuk pengeluaran pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan anggaran kas secara akurat (Mufidah, I., Afifudin, A., & Mawardi, M. C. ,2020).

Kesalahan atas pengakuan pendapatan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyebabkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan ikut meningkat mengindikasikan manajemen laba yang kurang baik pada perusahaan maskapai terbesar di Indonesia dimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harus membayar pengampunan pajak atau *tax amnesty* dari denda pengadilan Australia sebesar USD 145,8 juta pada tahun 2018 atau mengalami penurunan *Tax Retention Rate* menjadi sebesar 0,8 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,3 padahal dalam catatan pembukuan perusahaan saat itu mengalami rugi riil sebesar USD 67,6 juta, Direktur Utama Garuda Indonesia Padahal Mansury menegaskan bila tanpa pembayaran amnesti pajak dan denda di Australia, maka jumlah kerugian Garuda sebenarnya terbilang turun, yakni sebesar USD 38 juta (Ariyani, 2019).

Selain perencanaan pajak adapun faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yaitu beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*)

pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan beban pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau bertambahnya rugi sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2014:276).

Beban pajak tangguhan yang baik harus serendah mungkin supaya manajemen laba yang diperoleh dapat meningkat dengan signifikan dimana perusahaan mampu mengidentifikasi jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan, sebaliknya bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Pajak tangguhan tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat adanya dua pendekatan yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak kini (Kamil dan Ariyani, 2017).

Fenomena lain yang terjadi pada PT Blue Bird Tbk (BIRD) yaitu membukukan laba bersih Rp457,3 miliar pada 2018. Nilai itu meningkat 7,64% dari sebelumnya Rp424,86 miliar. manajemen BIRD menuliskan pendapatan neto perseroan pada 2018 mencapai Rp4,22 triliun. Nilai itu naik tipis 0,36% dari sebelumnya Rp4,2 triliun. Namun demikian, laba usaha terkoreksi menjadi Rp558,25 miliar dari 2017 sebesar Rp567,6 miliar (Hafiyyan,2019).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa beberapa perusahaan jasa sub sektor transportasi yaitu BIRD mengalami kenaikan manajemen laba dikarenakan mengurangi aktivitas operasi perusahaan yang menyebabkan manajemen laba meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Amin,M.,Susyanti,J &

ABS,M.,K (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan penelitian menurut Yunila & Aryati (2018) yang berpendapat bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Imam, I. C. (2016) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan penelitian menurut Negara, A. A., Plasa, G. R., & Saputra, I. D. (2017). Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap perusahaan melakukan manajemen laba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan transportasi berplat merah tahun 2018 telah memanipulasi laporan keuangannya yang seharusnya merugi karena penurunan angka perencanaan pajak dalam mengelola kewajibannya yang menyebabkan manajemen laba mengalami penurunan.

- 2) Adanya pengakuan pendapatan yang menyebabkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan ikut meningkat karena mengindikasikan manajemen laba yang kurang baik

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
- 2) Seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian (kegunaan akademis)

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- 2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi.